

## DAFTAR PUSTAKA

• **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2004, hlm.91.
- Buku Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 109
- Dunn William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- Dwidjowijoto, *Analisis Kebijakan*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2007.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rhineka Karsa, Yogyakarta, 2002, hlm.67
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kemitraan, *Yang legal Yang Beruntung*, Laporan Hasil Penjajakan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK, Kemitraan, Jakarta, 2012
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm. 190.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2002, hlm.70
- Poerwardarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1991, hlm 374
- Poerwardamita, *Kebijakan Publik*, Gava Media, Jakarta, 1994, hlm. 115.
- Raisul Muttaqain, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 179.
- Ronny Hatinijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.65

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 64.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Sudarwan, *Sertifikasi Legalitas Produk Kayu, Siapa Berani ?*, Asmindo Komda, Yogyakarta, 2012.

Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas Jakarta, 2006.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

*Peraturan Menteri Kehutanan Pasal 20 No.38/Menhut-II/2009 tentang “Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin”*

*Peraturan Menteri Kehutanan Pasal 4 No.38/Menhut-II/2009 Pasal 4 tentang “Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin”*

*Peraturan Bupati. Nomor 14/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.*

*Kementrian kehutanan. Nomor P/41/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hail Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.*

- **Lembaga**

Kemenhut, *Buku Statistik Kehutanan Indonesia*, 2011, dipublikasikan pada Juli 2012.

Rencana Stratejik (Renstra) 20001-2005 Departemen Kehutanan dan Perkebunan,  
[www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)

Tim Kecil Pengembangan Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, 2008.

Tim Kerja Pengembangan dan Perumusan sistem Verifikasi Legalitas Kayu, *Rancangan SVLK*”.

- **Penelusuran Internet**

Kementrian Lingkungan Hidup” *Kerusakan Hutan*”, [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)

Web Design Jatim, [Webdesign-jatim.com](http://Webdesign-jatim.com). Diakses tanggal 2011-07-21

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.wwf.or.id.gftn](http://www.wwf.or.id.gftn)

<http://www.hukumonline.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>